

EVALUASI KEMANDIRIAN FISKAL DI SULAWESI SELATAN: PENGARUH PENDAPATAN DAERAH DAN KEBIJAKAN DANA PERIMBANGAN

Devitriana¹

Rizka Jafar²

Email: rafiramdhani07@gmail.com

^{1,2} Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Economic Growth on the Level of Fiscal Independence of Regency / City in South Sulawesi Province. The data used in this study include secondary data from financial reports and regional economic statistics. The analysis method used is multiple linear regression analysis to test the effect of each independent variable on fiscal independence.

The results showed that the PAD variable had a positive and significant effect on the level of fiscal independence. This confirms that the greater the source of regional income derived from PAD, the higher the level of fiscal independence of the region. In contrast, the DAU and DAK variables have a negative and significant effect on the level of fiscal independence. This indicates that high dependence on transfers from the central government through DAU and DAK can reduce regional fiscal independence. This means that an increase in DAU or DAK actually reduces the ability of regions to be financially independent. Meanwhile, the Economic Growth variable does not show a significant effect on the level of fiscal independence. This shows that an increase in economic growth in the region is not always directly proportional to an increase in regional financial independence.

This study implies that increasing local revenue and reducing dependence on central transfers can be an important strategy for local governments to increase fiscal independence. The development of more sustainable regional revenue potential is one of the keys to strengthening regional fiscal capacity in South Sulawesi Province.

Keywords: *Regional Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Economic Growth, Fiscal Independence*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dari laporan keuangan dan statistik ekonomi daerah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kemandirian fiskal.

ARTICLE INFO

Received 30/08/2024

Accepted 31/08/2024

Online 01/09/2024

*Correspondence: Devitriana

E-mail:

rafiramdhani07@gmail.com

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian fiskal. Hal ini menegaskan bahwa semakin besar sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD, semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut. Sebaliknya, variabel DAU dan DAK memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian fiskal. Hal ini mengindikasikan bahwa ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat melalui DAU dan DAK dapat menurunkan kemandirian fiskal daerah. Artinya, peningkatan DAU atau DAK justru mengurangi kemampuan daerah untuk mandiri secara finansial. Sementara itu, variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian fiskal. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa peningkatan PAD dan pengurangan ketergantungan terhadap transfer pusat dapat menjadi strategi penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal. Pengembangan potensi pendapatan daerah yang lebih berkelanjutan menjadi salah satu kunci dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pertumbuhan Ekonomi, Kemandirian Fiskal, Sulawesi Selatan.

Pendahuluan

Kemandirian fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitas pemerintahnya sendiri maupun bantuan pelayanan kepada masyarakat (Larasati dkk, 2021). Kemandirian fiskal bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan setiap daerah menjadi lebih mandiri dan masyarakat yang semakin makmur.

Mulai tahun 2001 ditetapkan otonomi daerah membuat pemerintah pusat melimpahkan pelaksanaan desentralisasi fiskal ke pemerintah daerah dalam proses pembangunan suatu daerah Suryani (2020). Dengan adanya pengalihan tersebut akan mendorong efisiensi penggunaan sektor publik dalam rangka pembangunan daerah sebab pemerintah daerah dinilai lebih mengetahui potensi dan prospek perkembangan sumber daya alam yang ada di daerahnya.

Desentralisasi fiskal dapat menyatukan pemerintah kepada masyarakat sehingga, metode sentralisasi ini membuat perekonomian maupun pelayanan publik semakin efisien dan hal tersebut meningkatkan kemakmuran masyarakat dapat diartikan oleh *fiscal federalism theory*. Ada dua sudut pandang teoritis yang menunjukkan adanya dampak ekonomi dari desentralisasi (Khusaini, 2006) sebagai berikut: (1). *Traditional Theories (First Generation Theory)* lebih fokus pada keuntungan alokatif dari desentralisasi, agar mempermudah menghasilkan keterangan dari masyarakat sehingga keuntungan alokatif memiliki dua konsep. Pertama, pengaplikasian "*knowledge in society*", menurut Gor (2013) cara pemungutan keputusan yang terdesentralisasi hendak meringankan penggunaan informasi yang efisien. Dalam kerangka keuangan publik, pemerintah daerah memiliki banyak informasi dibandingkan pemerintah pusat mengenai bagaimana keadaan daerah. Oleh karena itu, dalam hal penyediaan barang dan pelayanan jasa publik maka pemerintah lebih berhak mengambil keputusan pada daerahnya ketimbang diberikan kepada pemerintah pusat. Kedua, mempublikasikan bagaimana pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi lingkungannya dalam memilih berbagai barang dan jasa publik. (2). *New Perspective Theories (Second Generation Theories)* menerangkan bagaimana desentralisasi berdampak pada perilaku pengelolaan daerah. Secara teoritis, ketika pemerintah daerah diberikan wewenang

oleh pemerintah pusat maka hal tersebut harus dilakukan dengan baik agar bisa menaikkan kesejahteraan masyarakat domestik. Implikasi esensial dari teori ini ialah bagaimana desentralisasi itu sendiri dapat meningkatkan perkembangan ekonomi daerah dan memajukan kesejahteraan masyarakat.

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Berikut Rasio kemandirian fiskal dengan 24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Salah satu indikator yang umumnya digunakan untuk mengukur stabilitas kemandirian fiskal suatu daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Ahmad, 2021). Jika sistem PAD daerah besar, maka daerah itu bisa dikatakan daerah yang mempunyai kemampuan pembiayaan yang besar sehingga, pemerintah daerah diharapkan senantiasa dapat menggali sumber-sumber potensi yang dapat digunakan sebagai sumber keuangannya.

Semakin berkembangnya pembangunan fisik di suatu daerah maka lebih besar ketergantungannya terhadap pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat dari relatif rendahnya PAD dan dominannya transfer pemerintah pusat ke daerah. kemampuan keuangan daerah otonom diukur menggunakan kinerja PAD sedangkan untuk mengukur kemandirian keuangan suatu daerah menggunakan rasio PAD terhadap dana transfer dan pinjaman. Di mana, PAD dan dana perimbangan merupakan sumber belanja pemerintah daerah yang memberikan dampak yang menguntungkan bagi belanja pemerintah daerah. Besar kecilnya perolehan PAD selalu dikaitkan dengan kemakmuran daerah dalam melaksanakan otonomi daerah (Suryani, 2020).

PAD merupakan salah satu bagian yang menjadi sumber keuangan bagi pemerintah daerah yang senantiasa akan selalu ditingkatkan, apalagi jika hal tersebut berkaitan terhadap pelaksanaan otonomi sebab kenaikan PAD merupakan pendapatan daerah dalam mendanai pengelolaan pemerintah daerah dapat memengaruhi tingkat perekonomian daerah Hasan, (2021). Fachril & Jeddawi (2014) menyatakan bahwa PAD adalah salah satu bentuk dari penerimaan daerah yang menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin besar PAD maka daerah tersebut dikatakan tidak lagi terlalu bergantung pada campur tangan pemerintah pusat sehingga, daerah tersebut dinyatakan sanggup menjalankan desentralisasi fiskal (Suryani, 2020). Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian menunjukkan bahwa PAD meningkatkan kemandirian keuangan daerah (Novianti, 2022). Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Perawati (2019) yang menunjukkan bahwa PAD tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Dana perimbangan yang diperoleh tiap-tiap daerah adalah kebijakan fiskal yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah guna memperkecil ketimpangan antar daerah. Kebijakan ini umumnya disebut sebagai Dana Alokasi Umum (DAU) (Ahmad, 2021). DAU sendiri ialah dana transfer yang dialokasikan untuk pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan tujuan mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah demi membiayai kebutuhan daerah dalam rangka penerapan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Pembagian DAU lebih diutamakan untuk daerah yang memiliki daya fiskal rendah sebab besaran anggaran DAU menjadi alat pemerataan dan juga sebagai penurunan disparitas fiskal antardaerah dalam era otonomi.

Pemerintah mengalokasikan DAU relatif besar pada daerah yang memiliki tingkat kemandirian fiskal rendah dan sebaliknya (Swandewi, 2014) Asumsi tersebut diperkuat oleh penelitian (Verawaty, 2017) yang mengungkapkan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal akan tetapi, (Septiani Fransisca, 2017) memaparkan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap kemandirian fiskal.

Salah satu kebijakan desentralisasi fiskal yang juga secara langsung dapat berpengaruh pada belanja pemerintah daerah adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK merupakan dana yang diperoleh dari penerimaan APBN dan distribusikan terhadap daerah terpilih guna membantu membiayai kegiatan khusus yakni urusan daerah yang sesuai prioritas nasional. DAK memiliki sifat *specific grant* artinya, bantuan keuangan dari pusat yang pemberiannya spesifik atau bersyarat. Pemberian ini biasanya bersifat *top-down* yang dipersiapkan oleh pemerintah pusat dalam membiayai bidang tertentu dan menjadi prioritas nasional (Bambang Juanda, 2017). DAK dapat digolongkan sebagai *matching grant* sebab memiliki tanggung jawab penyediaan modal pendamping dan *restricted grant* karena sifatnya sebagai *categorical grant-in-aid* (Setiyawati, 2014). Sumber pendapatan daerah dalam konteks ekonomi dan desentralisasi masih didominasi oleh bantuan keuangan dan donasi dalam wujud DAU dan DAK dialokasikan dalam APBN dan ditransfer ke pemerintah daerah, yang dimaksudkan agar setiap daerah mengalami pemerataan kinerja keuangan yang memungkinkan daerah membayar pelaksanaan desentralisasi (Anikmah Musfirati, 2019). DAK sama sekali tidak berpengaruh terhadap kemandirian fiskal karena seberapa besar pun DAK yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat tidak memiliki pengaruh pada kemandirian fiskal (Setiawan, dkk., 2021).

Kemandirian fiskal suatu daerah juga besar kaitannya dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah indikator untuk menentukan status ekonomi suatu daerah pada periode tertentu dan pertumbuhan ekonomi daerah sangat terkait dengan peningkatan produksi barang dan jasa, serta nilai tambah, yang pengukurannya berdasarkan pada aktivitas ekonomi di suatu daerah.

Data PDRB juga menunjukkan kemampuan masing-masing daerah dalam mengelola sumber daya atau potensi yang di milikinya, sehingga tingkat PDRB di setiap daerah bervariasi sesuai dengan potensi yang dimiliki (Kusuma, 2019). (Titin Kartika Putri, Boedijono, 2014) menyatakan keberhasilan suatu daerah dapat diukur dari besarnya kontribusi masyarakat setempat terhadap pertumbuhan ekonomi daerah atau biasanya disebut PDRB. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Mirsan, Hamzah dan Sjufri (2019) dalam (Larasati, 2021) yang menyatakan bahwa PDRB memiliki pengaruh positif terhadap derajat tingkat kemandirian di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011- 2017.

Suatu daerah dapat dikatakan daerah yang otonom apabila Pendapatan Asli Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto mengalami kenaikan. Demikian pula sebaliknya, jika Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terus bertambah, maka daerah tersebut belum bisa dikatakan mandiri karena masih memiliki kaitan pada dana yang bersumber dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, masih banyaknya daerah yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan menyebabkan suatu daerah belum mandiri. Sehingga peneliti melakukan pengkajian lebih mendalam agar mendapatkan solusi.

Data dan Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif yang pada dasarnya berfokus pada analisis data numerik. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang merupakan *cross section* (data panel) dengan 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2019-2021. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder diperoleh lewat laman resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan BPS Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk menentukan kemandirian fiskal di Provinsi Sulawesi Selatan digunakan rasio perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Total Penerimaan Daerah (TPD) selama periode penelitian. Adapun rumus kemandirian fiskal ialah menurut adalah:

$$\text{Kemandirian Fiskal} = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

Metode yang digunakan untuk menganalisis lebih lanjut pengaruh variabel independen yaitu PAD, DAU, DAK dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemandirian fiskal sebagai variabel dependen maka digunakan analisis regresi data panel *Fixed Effect Model* yang merupakan gabungan data *time series* dan *cross section*. Adapun model persamaan yang digunakan adalah:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \mu_{it} \dots\dots\dots(2)$$

Di mana: Y merupakan Tingkat Kemandirian Fiskal; X_1 diartikan sebagai realisasi Pendapatan Asli Daerah (rupiah); X_2 merupakan Dana Alokasi Umum (rupiah); X_3 merupakan Dana Alokasi Khusus (rupiah); X_4 merupakan Pertumbuhan Ekonomi (%); β_0 adalah Konstanta; $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ adalah Koefisien regresi; dan μ adalah *Error term*.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Regresi linear berganda adalah model statistik yang digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara satu atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kemandirian fiskal (Y), sedangkan variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2), Dana Alokasi Khusus (X_3) dan Produk Domestik Regional Bruto (X_4).

Tabel 1. Uji Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	31.12664	4.132641	7.531901	0.0000
PAD	4.76E-11	6.81E-12	6.984651	0.0000
DAU	-2.02E-11	5.28E-12	-3.828216	0.0004
DAK	-3.32E-11	6.87E-12	-4.838009	0.0000
PE	0.023624	0.069367	0.340566	0.7351

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linear berganda yang telah dilakukan pada Tabel 1 dengan menggunakan Eviews. diperoleh model persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 31.12604 + 4.76E-11 X_1 - 2.02E-11 X_2 - 3.32E-11 X_3 + 0.023624 X_4$$

Nilai konstanta (α) sebesar 31.12604 menunjukkan bahwa apabila variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2), Dana Alokasi Khusus (X_3), dan Pertumbuhan Ekonomi (X_4) dianggap konstan atau nilainya tidak berubah, maka tingkat kemandirian fiskal (Y) sebesar 31.12604. Pada nilai koefisien regresi untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) yaitu sebesar 4.76E-11. Koefisien regresi yang bernilai positif artinya setiap perubahan Variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) sebesar satu persen diharapkan akan meningkatkan kemandirian fiskal sebesar 4.76E-11, dengan asumsi bahwa variabel DAU (X_2), DAK (X_3) dan Pertumbuhan Ekonomi (X_4) bersifat konstan.

Nilai koefisien regresi untuk variabel Dana Alokasi Umum (X_2) sebesar -2.02E-11 dengan koefisien regresi yang bernilai negatif artinya setiap perubahan DAU sebesar satu persen akan menurunkan tingkat kemandirian fiskal (Y) sebesar -2.02E-11, dengan asumsi bahwa variabel PAD (X_1), DAK (X_3) dan Pertumbuhan Ekonomi (X_4) bersifat konstan. Untuk, nilai koefisien regresi untuk variabel Dana Alokasi Khusus (X_3) sebesar -3.32E-11 dengan koefisien regresi yang bernilai negatif yang artinya setiap perubahan DAU sebesar satu persen akan menurunkan tingkat kemandirian fiskal (Y) sebesar -3.32E-11 dengan asumsi bahwa variabel PAD (X_1), DAU (X_2) dan Pertumbuhan Ekonomi (X_4) bersifat konstan. Dan, nilai koefisien regresi untuk variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.023624 dengan koefisien regresi yang bernilai positif, berarti setiap perubahan variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar satu persen akan meningkatkan tingkat kemandirian fiskal (Y) sebesar 0.023624 dengan asumsi bahwa variabel PAD (X_1), DAU (X_2) dan DAK (X_3) bersifat konstan.

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi data panel diputuskan bahwa model regresi yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil estimasi regresi dapat dilihat melalui Tabel 2.

Tabel 2. Model Fixed Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	31.12664	4.132641	7.531901	0.0000
PAD	4.76E-11	6.81E-12	6.984651	0.0000
DAU	-2.02E-11	5.28E-12	-3.828216	0.0004
DAK	-3.32E-11	6.87E-12	-4.838009	0.0000
PE	0.023624	0.069367	0.340566	0.7351

Sumber: data diolah, 2023

Melalui hasil estimasi regresi data panel pada Gambar 4, terlihat bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian fiskal. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian fiskal di Provinsi Sulawesi Selatan.

Uji Hipotesis**Uji Koefisien Determinasi (R^2)**

Tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Bila R^2 mendekati 1 (100%) maka variasi variabel bebas terhadap variabel terikat sangat tinggi. Sebaliknya jika nilai R^2 mendekati 0 maka menunjukkan variasi variabel bebas terhadap variabel terikat rendah (Sarton, 2021).

Tabel 3. Koefisien Determinasi

R-squared	0.994551	Mean dependent var	18.78611
Adjusted R-squared	0.991207	S.D. dependent var	13.27620
S.E. of regression	1.244940	Akaike info criterion	3.561353
Sum squared resid	68.19455	Schwarz criterion	4.446723
Log likelihood	-100.2087	Hannan-Quinn criter.	3.913822
F-statistic	297.4212	Durbin-Watson stat	2.775177
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 3, hasil perhitungan uji R-Squared diperoleh sebesar 0.99 persen. Hal ini berarti menandakan bahwa kemampuan variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2), Dana Alokasi Khusus (X_3) dan Pertumbuhan Ekonomi (X_4) mampu menjelaskan Tingkat Kemandirian Fiskal sebesar 99.

Uji F

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh seluruh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Produk Domestik Regional Bruto secara bersama-sama berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Fiskal. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas F statistik dengan nilai F_{α} . Apabila nilai probabilitas $< \alpha = 0,05$, maka semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 4. Uji F-Statistik

R-squared	0.994551	Mean dependent var	18.78611
Adjusted R-squared	0.991207	S.D. dependent var	13.27620
S.E. of regression	1.244940	Akaike info criterion	3.561353
Sum squared resid	68.19455	Schwarz criterion	4.446723
Log likelihood	-100.2087	Hannan-Quinn criter.	3.913822
F-statistic	297.4212	Durbin-Watson stat	2.775177
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: data diolah, 2023

Hasil uji F-statistik pada Gambar 4 menunjukkan nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,00000 $< 0,05$, artinya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Tingkat Kemandirian Fiskal di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2019-2021.

Uji t

Uji t statistik digunakan untuk mengetahui signifikansi secara parsial variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap variabel dependen yaitu Tingkat Kemandirian Fiskal. Untuk menentukan variabel independen tersebut signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dapat dilihat dengan membandingkan nilai probabilitasnya dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$

Tabel 5. Uji t-Statistik

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	31.12664	4.132641	7.531901	0.0000
PAD	4.76E-11	6.81E-12	6.984651	0.0000
DAU	-2.02E-11	5.28E-12	-3.828216	0.0004
DAK	-3.32E-11	6.87E-12	-4.838009	0.0000
PE	0.023624	0.069367	0.340566	0.7351

Sumber: Data diolah, 2023

Pembahasan

Tingkat Kemandirian Fiskal

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstrem. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstrem semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (Suhanda, 2017).

Pelaksanaan otonomi daerah di setiap daerah Kabupaten/Kota ditekankan pada kemampuannya dalam membiayai sendiri segala bentuk kegiatan daerahnya masing-masing di mana pembiayaan itu diperoleh dari pendapatan asli daerah. Maka, menjadi suatu tugas yang sangat penting bagi masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota untuk menggali sumber keuangan daerahnya agar dapat menghasilkan pendapatan asli daerah dengan jumlah yang maksimum guna menanggulangi semua aktivitas ataupun kegiatan pada setiap daerahnya, sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat dalam pembiayaan daerah semakin kecil. Dengan semakin kecil tingkat ketergantungannya tersebut, maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri. Berikut tingkat kemandirian fiskal tiap Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 6 menunjukkan rasio kemandirian fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019-2021 rata-rata 0-25%. Pada tahun 2019-2021 rasio kemandirian fiskal tertinggi adalah kota Makassar sebesar 71,34% dengan korelasi rasio partisipatif artinya Kota Makassar dalam mengelola anggarannya sendirinya terjadi peningkatan yang baik dan sudah

mulai berkurang ketergantungannya terhadap pemerintah pusat. Sedangkan pada rasio kemandirian terendah Kabupaten Toraja Utara dengan korelasi rasio instruktif artinya Kabupaten Toraja Utara masih sangat membutuhkan kontribusi dari pemerintah pusat sebab tidak mampu memaksimalkan pendapatan pajak dan retribusinya.

**Tabel 6: Rasio Kemandirian Fiskal (%) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2019-2021**

Kab/Kota	2019	2020	2021	Hubungan
Selayar	9,228	8,806	7,042	Instruktif
Bulukumba	16,744	17,129	15,686	Instruktif
Bantaeng	13,596	16,481	17,088	Instruktif
Jeneponto	9,774	12,393	11,121	Instruktif
Takalar	12,173	16,616	15,413	Instruktif
Gowa	18,719	18,81	21,027	Instruktif
Sinjai	11,594	12,009	10,473	Instruktif
Maros	25,924	24,789	21,324	Instruktif
Pangkep	18,116	20,478	16,722	Instruktif
Barro	14,651	15,692	13,832	Instruktif
Bone	14,088	18,63	11,861	Instruktif
Soppeng	15,18	17,739	17,497	Instruktif
Wajo	13,093	14,365	13,921	Instruktif
Sidrap	13,34	16,085	15,575	Instruktif
Pinrang	13,628	14,086	14,675	Instruktif
Enrekang	9,367	10,797	9,677	Instruktif
Luwu	10,795	12,988	13,981	Instruktif
Toraja utara	8,347	8,155	5,826	Instruktif
Luwu Utara	13,891	12,557	14,048	Instruktif
Luwu Timur	42,954	48,929	42,055	Konsultatif
Tanah Toraja	14,57	14,609	11,423	Instruktif
Makassar	71,34	68,529	71,95	Partisipatif
Pare-Pare	21,112	28,963	28,395	Konsultatif
Palopo	22,522	26,524	20,103	Instruktif

Sumber: (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) diolah

Pelaksanaan otonomi daerah di setiap daerah Kabupaten/Kota ditekankan pada kemampuannya dalam membiayai sendiri segala bentuk kegiatan daerahnya masing-masing di mana pembiayaan itu diperoleh dari pendapatan asli daerah. Maka, menjadi suatu tugas yang sangat penting bagi masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota untuk menggali sumber keuangan daerahnya agar dapat menghasilkan pendapatan asli daerah dengan jumlah yang maksimum guna menanggulangi semua aktivitas ataupun kegiatan pada setiap daerahnya, sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat dalam pembiayaan daerah semakin kecil. Dengan semakin kecil tingkat ketergantungannya tersebut, maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri. Berikut tingkat kemandirian fiskal tiap Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 6 menunjukkan rasio kemandirian fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019-2021 rata-rata 0-25%. Pada tahun 2019-2021 rasio kemandirian fiskal tertinggi adalah kota Makassar sebesar 71,34% dengan korelasi rasio partisipatif artinya Kota Makassar dalam mengelola anggarannya sendirinya terjadi peningkatan yang baik dan sudah mulai berkurang ketergantungannya terhadap pemerintah pusat. Sedangkan pada rasio kemandirian terendah Kabupaten Toraja Utara dengan korelasi rasio instruktif artinya Kabupaten Toraja Utara masih sangat membutuhkan kontribusi dari pemerintah pusat sebab tidak mampu memaksimalkan pendapatan pajak dan retribusinya.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Kemandirian Fiskal

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kemandirian fiskal di Provinsi Sulawesi Selatan. Dapat diartikan ketika realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan maka diikuti dengan peningkatan rasio kemandirian fiskal. Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000 di mana nilai tersebut lebih kecil dibandingkan nilai signifikansi $\alpha = 0,05$ yang berarti berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kemandirian fiskal sebagai variabel dependen, artinya kenaikan satu persen Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan kemandirian fiskal. Berdasarkan tiga tahun terakhir Rasio kemandirian fiskal di Provinsi Sulawesi Selatan dengan rata-rata sebesar 18,77 persen dengan korelasi hubungannya dapat dikatakan masih instruktif. Selain itu, di beberapa Kabupaten/Kota mengalami peningkatan di tiap tahunnya dan adanya perubahan pada pola hubungan seperti pada Kabupaten Luwu Timur sebesar 44,64 persen dengan korelasi pola hubungannya konsultatif dan Kota Makassar sebesar 70,60 persen dengan pola hubungannya dapat dikatakan partisipatif.

Semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh daerah, maka semakin meningkat kemandirian keuangan daerah. Dalam artian bahwa pendapatan pemerintah daerah yang bersumber pajak atas lapangan usaha termasuk pajak hotel, restoran, dan hiburan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak parkir juga meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat. Peningkatan pajak daerah diperkirakan terus terjadi seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak di wilayah Sulawesi Selatan. Hal ini didukung atas peningkatan jumlah wajib pajak yang melakukan pelaporan pajak melalui SPT tahunan (Perekonomian SulSel, 2023). Penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Teori *Signalling* yang mengungkapkan bahwa kenaikan Pendapatan Asli Daerah adalah sinyal ketercapaian kemandirian keuangan daerah. Sehingga, pemerintah daerah dianggap mampu menggali potensi sumber daya daerahnya sendiri dan tidak terlalu bergantung pada pemerintah provinsi/pusat.

Berdasarkan data Realisasi Pendapatan Asli Daerah masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan kenaikan Kota Makassar menjadi daerah yang memiliki pendapatan paling tinggi dari Rp1,303 triliun di tahun 2019 dan di tahun 2020 sebesar Rp1,078 triliun menjadi Rp1,140 triliun di tahun 2021, disusul oleh Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Gowa yang juga memiliki kenaikan realisasi pendapatan asli daerah di mana Kabupaten Luwu Timur Rp321,15 miliar di tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebesar Rp329,22 miliar menjadi Rp305,93 miliar di tahun 2021, lalu untuk Kabupaten Gowa memiliki realisasi penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp238,24 miliar dan di tahun 2020 sebesar Rp241,47 miliar menjadi Rp260,89 di tahun 2021. Sedangkan untuk daerah yang realisasi penerimaan pendapatan asli daerahnya rendah yaitu Kabupaten Toraja Utara hal ini disebabkan kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah dan juga kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ishak, (2022) menyatakan Pendapatan Asli Daerah memberikan pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap kemandirian keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ahmad, (2021), menemukan hasil sama yang menyatakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Tingkat Kemandirian Fiskal

Berdasarkan hasil regresi, Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemandirian fiskal di Provinsi Sulawesi Selatan. Pengaruh Dana Alokasi Umum yang signifikan ini mengindikasikan bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan masih mengandalkan transfer dari pemerintah pusat sebagai sumber dana untuk membiayai pembangunan daerah. Variabel Dana Alokasi Umum nilai probabilitas sebesar 0,0000 di mana nilai tersebut lebih kecil dibandingkan nilai signifikansi $\alpha = 0,05$ yang berarti berpengaruh terhadap variabel tingkat kemandirian fiskal sebagai variabel dependen. Arah koefisien Dana Alokasi Umum yang negatif berarti ketika Dana Alokasi Umum meningkat maka kemandirian keuangan daerah akan menurun, apabila terjadi penurunan terhadap Dana Alokasi Umum maka kemandirian keuangan daerah akan meningkat.

Refocusing mandatory yang semula sebesar 25 persen khususnya dari DAU digunakan untuk pendanaan belanja infrastruktur, sebesar 15 persen untuk mendukung pendanaan program pemulihan ekonomi daerah. Program tersebut antara lain dengan memberikan stimulasi perekonomian daerah dan upaya mempertahankan daya beli masyarakat di antaranya melalui kegiatan produktif yang menyerap tenaga kerja dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu di kawasan Sulawesi yang Dana Alokasi Umumnya tinggi pada tahun 2019 (KFR, 2020).

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu jenis dari dana perimbangan yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah yang seharusnya hanya bersifat pendukung bagi pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah. Semakin kecil Dana Alokasi Umum dalam menopang pembiayaan daerah diharapkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemberian transfer pemerintah pusat akan semakin rendah sehingga kemandirian daerah akan terwujud.

Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal, dan potensi daerah. Kebutuhan daerah dicerminkan dari luas daerah, keadaan

geografis, jumlah penduduk, tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. Sedangkan kapasitas fiskal dicerminkan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Sumber Daya Alam.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chabibillah (2019) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian lain dilakukan oleh Kustianingsih (2019) menemukan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Utami (2018), menemukan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh dan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini berarti Jika DAU yang dialokasikan pemerintah pusat ke daerah relatif besar maka daerah tersebut dikatakan kurang mandiri karena daerah tersebut masih mengandalkan dana dari pemerintah pusat sebagai penerimaan utamanya.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Tingkat Kemandirian Fiskal

Berdasarkan hasil regresi pada Gambar 2, Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemandirian fiskal di Provinsi Sulawesi Selatan. Semakin besar nilai transfer Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat maka tingkat kemandirian keuangan daerah semakin rendah, sebaliknya semakin kecil transfer Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat maka tingkat kemandirian keuangan semakin tinggi. Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi urusan daerah serta untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah serta lingkungan hidup.

Dana Alokasi Umum fisik maupun non fisik berperan sebagai motor penyelaras pembangunan nasional dan berbasis program agar terjadi sinergi yang kuat antara bidang dan bidang K/L dengan DAK fisik, utamanya untuk DAK yang bersifat penugasan, misal program penguatan ketahanan pangan, penanganan *stunting*, program penyediaan infrastruktur berkelanjutan. Pada Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan DAK fisik terbesar di wilayah regional Sulawesi, dengan 24 pemerintah daerah. Sulawesi Selatan merupakan Provinsi yang jumlah pemerintahan daerah terbesar di wilayah Sulawesi sehingga memerlukan pembiayaan besar dalam melaksanakan program pembangunan (KFR, 2020).

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, DAK merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintah di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat (KFR, 2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marizka, (2013) menyatakan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian lain dilakukan oleh Kustianingsih (2019), menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Hal ini berarti semakin DAK yang diterima daerah maka kemandirian keuangan daerah semakin besar.

Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemandirian Fiskal

Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian fiskal di Provinsi Sulawesi Selatan. Kenyataan yang terjadi dalam pemerintahan daerah saat ini (Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2019-2021) adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan kemandirian keuangan daerah, hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya tingkat kemandirian keuangan daerah berdasarkan perbandingan pendapatan asli daerah dengan penerimaan daerah. Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian fiskal. Ini menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi bukan salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat Kuncoro, (2004). Secara teori pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan. Hal ini juga sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Adolf Wagner dalam Rapiuddin dan Rusyadi (2017) menyatakan bahwa dalam perekonomian apabila pendapatan per kapita masyarakat meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan meningkat terutama di sebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat. Pembangunan ekonomi ini dapat ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan yang di mana, pertumbuhan ekonomi hanya lebih berfokus pada pembangunan sumber daya manusia (Kuncoro, 2004).

Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh D.Tolosang, (2018) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah berarti bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tidak selalu diikuti dengan peningkatan kemandirian keuangan daerah, walaupun Produk Domestik Regional Bruto tiap tahunnya meningkat Prasetyo (2020) dan Utami (2018).

Kesimpulan

Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian fiskal di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan kemandirian dalam APBD terkait dengan kemandirian Pendapatan Asli Daerah sebab semakin besar sumber pendapatan dari potensi daerah, bukan dari bantuan pemerintah pusat, maka daerah dapat dikatakan mandiri secara keuangan.

Variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemandirian fiskal di Provinsi Sulawesi Selatan. Karena pemerintah daerah masih sangat bergantung pada bantuan transfer pada pemerintah pusat sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah, pemberian Dana Alokasi Umum hanya menjadi pendukung dalam pelaksanaan dan pembangunan daerah. Arah Dana Alokasi Umum yang negatif artinya apabila Dana Alokasi Umum naik maka kemandirian keuangan daerah akan turun.

Variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemandirian fiskal di Provinsi Sulawesi Selatan. Karena Semakin besar nilai transfer Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat maka tingkat kemandirian keuangan daerah semakin

rendah, sebaliknya semakin kecil transfer Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat maka tingkat kemandirian keuangan semakin tinggi.

Variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian fiskal di Provinsi Sulawesi Selatan. Karena peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan kemandirian keuangan daerah, hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya tingkat kemandirian keuangan daerah berdasarkan perbandingan pendapatan asli daerah dengan penerimaan daerah.

Referensi

- Adhiantoko, H. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 - 2011).
- Ahmad, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah di Kota Makassar. 5(April), 17–37.
- Andriana, N. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah. 3.
- Anggi Pramata Nasution, B. H. dan I. R. A. P. (2018). Analisis Pengaruh PAD, Transfer Pemerintah Pusat, dan Efisiensi Belanja Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
- Anikmah Musfirati, H. S. (2019). Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan dana keistimewaan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. 5, 20–36.
- Arfah, A., Halim, A., & Kusuma, P. (2020). Factors Affecting The Export of Coffee In South Sulawesi Province. 1(3), 39–50.
- Asmara, S. C. S. dan A. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten.
- Bambang Juanda, H. H. (2017). Reformasi Mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) Untuk Mendorong Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan di Indonesia. 2.
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. 2019-2021. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2021.
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. 2019-2021. Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2021.
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. 2019-2021. Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2021.
- Basari, M. A. (2018). Peran Pendapatan Asli Daerah dalam Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.

- Bella, S., Sari, F., & Aswin, U. R. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandir. 3(5).
- Damayanti, Z. dan H. (2021). Belanja Daerah Di Kabupaten Kulon Progo ,.
- Diana Febriani Hasibuan, Miksalmina, Z. (2021). Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia. 8(2), 138–148.
- Djauhari, T. N. S. (2021). Dampak pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia di kota palopo.
- Dori, S. (2014). Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat.
- Enjelita, C. (2016). Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah : Studi Pada Kota Manado (Tahun 2010-2014) *Autonomy : Studies In The City Of Manado (2010-2014)*. 16(02), 355–365.
- Fachril, M., & Jeddawi, H. (2014). Alternatif strategi menekan kesenjangan kemandirian fiskal antar daerah di indonesia. 23.
- Gor, Q. J. (2013). Desentralisasi Fiskal.
- Gujarati. (2012a). *Dasar-dasar Ekonometrika (Terjemahan)*. Buku Edisi 5. Penerbit Salemba: Jakarta.
- Indah, S. N. (2022). Analisis Tingkat Kemandirian Daerah dan Efektivitas PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kabupaten Gowa.
- Kusuma, A. M. (2019). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah: Ditinjau dari Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk Kabupaten Pati Tahun 2005-2019. November 2020, 233–250.
- Larasati, N. (2021). Determinan tingkat kemandirian fiskal di provinsi jawa tengah.
- Larasati, N., Studi, P., Pembangunan, E., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., & Surakarta, U. M. (2021). Determinan tingkat kemandirian fiskal di provinsi jawa tengah.
- Muh. Almunawir Mirsan, Nasir Hamzah, M. S. (2019). Pengaruh investasi, pdrb perkapita dan pendapatan asli daerah terhadap derajat kemandirian fiskal. (studi kasus Provinsi Sulawesi Selatan). 2(32).
- Nadia Putri Saraswati, N. N. H. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi, Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
- Noviyanti, D. (2020). Pengaruh PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung.
- Perawati. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

- Puguh Setiawan, Rina Widiyanti, Liesma Maywarni Siregar, Nurhaida, E. O. (2021). Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2010-2016. VII(1), 44–53.
- Puspita, A. (2019). Pengaruh Inflasi dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan. Pengaruh Inflasi dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan.
- Radianto. (1997). Otonomi Keuangan Tingkat II Suatu Studi di Maluku. Prisma, 3.
- Rahmadi, S. (2013). Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bungo. 1(1), 1–10.
- Ramadani, R. A. (2021). No Title. In Pengaruh Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan.
- Rizky, R. L., Agustin, G., & Mukhlis, I. (2016). Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia. 8(1), 9–16.
- Sari, P. I. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di DIY Periode 2007-2014).
- Setiyawati, N. H. & H. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Propinsi Jawa Tengah. Xviii(01), 45–58.
- Siregar, B. (2015). Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.
- Suryani. (2020). Analisis Ketimpangan dan Kemandirian Keuangan Daerah Ajatappareng.
- Swandewi, A. A. I. A. (2014). Pengaruh Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Keserasian Anggaran dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. 7, 356–376.
- Titin Kartika Putri, Boedijono, H. R. (2014). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Jember.
- V. N. P., Ria, R., Hasibuan, A., Kartika, A., & Suwito, F. A. (2022). Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal. 4, 683–693. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i3.887>
- Verawaty, Septiani Fransisca, R. R. (2017). Determinan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. 3, 1–10.
- Wiksuana, I. G. B. (2018). ekonomi di wilayah sarbagita provinsi bali Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia Pembangunan nasional merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dala. 7(5), 2592–2620.
- Wulandari, A. (2001). Kemampuan Keuangan Daerah (Studi Kasus Kota Jambi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah).